

Seminar Nasional “Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan”
PPI Rektorat Universitas Merdeka Malang, 7 Agustus 2009

Penerapan Kearifan Lokal Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana Studi kasus Kota Teluk Dalam Nias Selatan

Sukawi¹

¹Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof Sudarto SH Tembalang Semarang 50131 Telp 024 70585369
Email: zukawi@gmail.com & zukawi@yahoo.com

Abstrak

Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan di kota Teluk Dalam, Nias Selatan perlu mendapat dukungan semua pihak dan pemerintah daerah setempat juga perlu mempersiapkan diri dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Koordinasi antarpihak menjadi agenda penting untuk kelanjutan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perlu diperkuat dengan adanya suatu forum atau organisasi perencanaan berbasis masyarakat. Karena salah satu syarat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah dengan adanya forum atau organisasi yang sifatnya berkelanjutan. Melalui suatu forum, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, sebaliknya forum tersebut juga dapat berperan menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat di tingkat bawah secara langsung.

Forum kota dapat mencerminkan prinsip keterwakilan agar tetap terjaga komitmen bersama untuk membawa kepentingan-kepentingan masyarakat kepada pihak-pihak pengambil keputusan. Dengan forum kota, kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat dapat diterapkan dan dijawab dalam wujud tata kota yang adaptif-responsif terhadap lingkungan yang rawan bencana. Metode yang digunakan adalah yang cocok dengan situasi dan kondisi pembangunan serta tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah Metode Community-Based. Pembuatan keputusan didasarkan atas masyarakat lokal sebagai ahlinya dan pendatang merupakan fasilitator teknis yang keberadaannya adalah untuk belajar. Metode yang terkait adalah Participatory Rural Appraisal (PRA).

Berdasarkan hasil peninjauan aspirasi masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal dengan berkaitan dalam kegiatan perencanaan kembali Kota Teluk Dalam pasca bencana gempa dan tsunami: Kota Teluk Dalam memiliki potensi laut, sungai, pantai, yang dapat dikembangkan sebagai waterfront city. Tepi pantai ini dapat dipakai untuk kegiatan yang bersifat rekreatif dan sekaligus bermanfaat sebagai lading mata pencaharian nelayan. Pemanfaatan tepi pantai ini sesuai dengan kearifan lokal bahwa tepi pantai hanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian sedangkan hunian bagi masyarakat tradisional harus berada di bukit yang tinggi sesuai dengan kepercayaan leluhur suku Nias. Selain itu sudah sejak lama, Nias merupakan daerah yang berpotensi terjadi gempa dan tsunami sehingga nenek moyang mereka melarang untuk tinggal disekitar pantai.

Kata Kunci – Kearifan lokal, partisipasi masyarakat, perencanaan kota

1. PENDAHULUAN

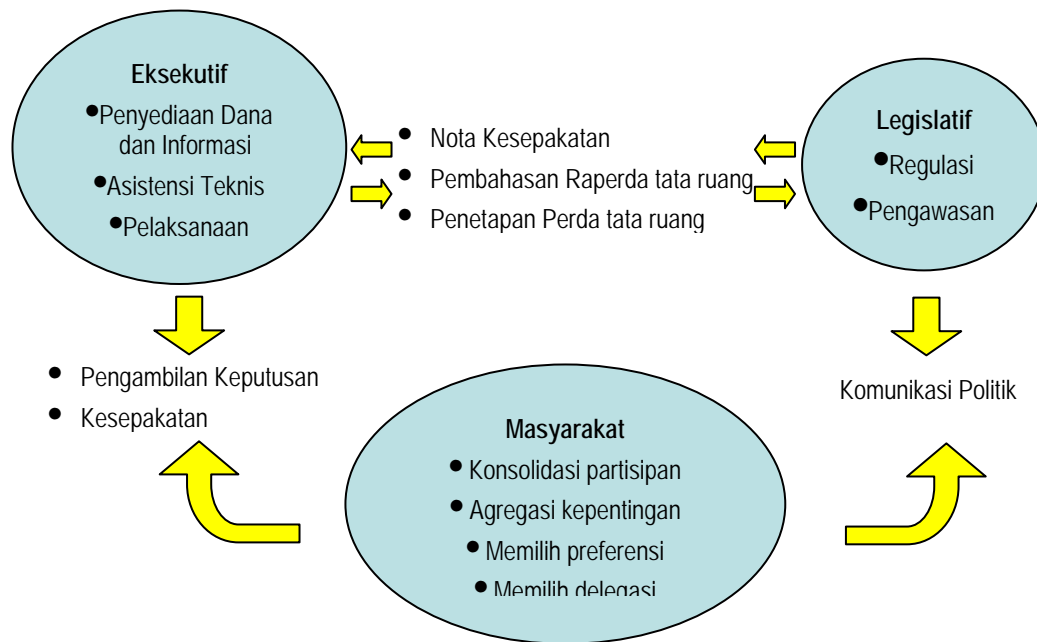
Proses dalam pelaksanaan pembangunan, hakikatnya melibatkan seluruh komponen daerah. Seluruh komponen, yaitu Eksekutif (DPRD), Legislatif (pemerintah daerah), dan masyarakat mempunyai tugasnya masing-masing. Masyarakat sebagai sumber informasi pembangunan menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan aspirasinya kepada legislatif dan eksekutif. Sementara eksekutif sebagai pelaksana pembangunan berkonsultasi dengan legislatif membahas aspirasi-aspirasi tersebut berkaitan dengan materi, masa pelaksanaan dan pendanaan pembangunan. Dan legislatif mengesahkannya menjadi perangkat hukum yang mengikat seluruh komponen daerah.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan identifikasi potensi dan kendala di wilayah studi, dalam hal ini adalah Kecamatan Teluk Dalam, *stakeholder* sangat berperan dalam memberikan informasi

mengenai kondisi eksisting sekaligus memberikan usulan-usulan mengenai program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Dari kegiatan-kegiatan pertemuan/*workshop* yang telah dilakukan diketahui potensi *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama dalam perencanaan pembangunan kembali Kota Teluk Dalam. *Stakeholder-stakeholder* tersebut antara lain adalah:

- Masyarakat, yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh wanita;
- Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Sekretaris Desa, serta Bappeda; serta
- BRR dan Lembaga Donor Asing/NGO/LSM.



Gambar 1
Hubungan Antara Eksekutif – Legislatif – Masyarakat
dalam Pengambilan Keputusan
(Sumber: Hasil Kajian Tim P5 Undip, 2006)

Peran dari masing-masing *stakeholder* sangat berpengaruh dalam proses konsultasi publik nanti karena mereka adalah pihak-pihak yang akan memanfaatkan hasilnya berupa peraturan daerah. Peran *stakeholder* dalam perencanaan tata ruang Kota Teluk Dalam dapat digambarkan sebagai berikut;

- Masyarakat, berperan memberikan usulan, masukan, dan koreksi terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui usaha-usaha swadaya.
- Pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator dan *enabler* kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian.
- Dunia usaha menyampaikan/memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kegiatan dunia usaha.
- LSM/NGO, akademisi, asosiasi profesi, dan sebagainya memberdayakan masyarakat dan membantu merumuskan usulan-usulan masyarakat yang dituangkan dalam aspek perencanaan.